

TESIS

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

*FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS
ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS IN THE
GOVERNMENT OF TANA TORAJA DISTRICT*

Disusun dan diajukan oleh

**HERLA SARTIKA PALA'LANGAN
A042182018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020



TESIS

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

disusun dan diajukan oleh :

HERLA SARTIKA PALA'LANGAN
A042182018

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
Pada tanggal 30 September 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasehat,

Ketua

Anggota

Dr. Jusni, S.E., M.Si.

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herla Sartika Pala'langan
NIM : A042182018
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, September 2020

Yang membuat pernyataan,



HERLA SARTIKA PALA'LANGAN



PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Dr. Muhammad Jusni, SE., M.Si dan Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., Ak., M.Si., CA, Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, Bupati Toraja Utara yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.

Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dr. Abd. Hamid Habbe, SE., M.Si, Dr. Sabir, SE., M.Si., dan Tim Penilai Tesis yang telah memberikan



arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.

7. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah kelas Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.
8. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya.

Penulis

Herla Sartika P



ABSTRAK

HERLA SARTIKA PALA'LANGAN. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Dibimbing oleh Jusni dan Syarifuddin Rasyid)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi terhadap kualitas SAP berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi dan literatur dimana data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan model regresi linear berganda (Multiple Regression Analysis) untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data penelitian diolah dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebaliknya semakin rendah kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja maka akan semakin rendah pula kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Semakin tinggi nilai pemanfaatan teknologi informasi akan mempengaruhi semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan, semakin rendah nilai pemanfaatan teknologi informasi akan mempengaruhi pula semakin rendah kualitas laporan keuangan. Terdapat hubungan antara komitmen organisasi dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Semakin tinggi komitmen organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Sebaliknya semakin rendah komitmen organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja maka akan semakin rendah pula kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Kata Kunci: Kualitas Laporan, Kompetensi, Pemerintah Daerah.



ABSTRACT

HERLA SARTIKA PALA'LANGAN. Factors Affecting the Quality of Financial Statements Accrual-Based Government Accounting Standards in the Tana Toraja Regency Government (Supervised by Jusni and Syarifuddin Rasyid)

This study aims to analyze the effect of the quality of human resources, utilization of information technology, organizational commitment to the quality of accrual-based SAP in the Tana Toraja Regency government.

Data were collected using questionnaires, interviews, documentation, and literature where the data collected were analyzed using multiple linear regression models (Multiple Regression Analysis) to see the effect of independent variables on the dependent variable. The research data were processed using the SPSS program.

The results showed that the higher the competence of human resources in the Regional Government of Tana Toraja Regency, the higher the quality of the financial reports of the Tana Toraja Regency Government, conversely the lower the competence of human resources in the Regional Government of Tana Toraja Regency, the lower the quality of the report. Finance of the Regional Government of Tana Toraja Regency. The higher the value of the use of information technology will affect the higher the quality of financial reports, the lower the value of the use of information technology will also affect the lower the quality of financial reports. There is a relationship between organizational commitment and the quality of the financial reports of the Tana Toraja Regency Government. The higher the organizational commitment to the Regional Government of Tana Toraja Regency, the higher the quality of the financial reports of the Tana Toraja Regency Government. On the other hand, the lower the organizational commitment to the Tana Toraja Regency Government, the lower the quality of the financial reports of the Tana Toraja District Government.

Keywords: Report Quality, Competence, Local Government.



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	321
Tabel 5. 1 Rincian Penyebaran Dan Pengembalian Kuesioner.....	38
Tabel 5. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 5. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	39
Tabel 5. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
Tabel 5. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	40
Tabel 5. 6 Dasar interpretasi skor item dalam variabel penelitian	41
Tabel 5. 7 Deskripsi Variabel Kompetensi SDM (X1)	42
Tabel 5. 8 Deskripsi Variabel Pemanfaatan Tekonologi Informasi (X2)	43
Tabel 5. 9 Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi (X3).....	44
Tabel 5. 10 Deskripsi Variabel kualitas laporan keuangan berbasis akrual (Y)..	45
Tabel 5. 11 Uji Hipotesis berdasarkan Path Coeficient	47
Tabel 5. 12 Rekapitulasi Uji Hipotesis	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian	266
---	-----



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teoritis.....	8
2.1.1 Konsep Laporan Keuangan.....	8
2.1.2 Konsep New Public Management.....	9
2.1.3 Teori Akuntansi Positif.....	11
2.1.4 Teori Stukturisasi.....	12
2.1.5 Teori Technology Acceptance Model.....	13
2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.....	14
2.1.7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	16
2.1.8 Karakteristik kualitas laporan keuangan berbasis akrual.....	17
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	20
2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas SAP Berbasis Akrual.....	20
2.2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas SAP Berbasis Akrual.....	20
2.2.3 Komitmen Organisasi terhadap Kualitas SAP Berbasis Akrual.....	21
2.3 Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS	25
3.1 Kerangka Pikir.....	25
3.2 Hipotesis.....	27
METODE PENELITIAN	28
Rancangan Penelitian.....	28
Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	29



4.4 Jenis dan Sumber Data	31
4.5 Metode Pengumpulan Data	31
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	32
4.7 Teknik Analisis Data	35
4.7.1 Persamaan Regresi Berganda.....	36
4.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	36
4.7.3 Uji Hipotesis	47
4.7.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	37
BAB V HASIL PENELITIAN	38
5.1 Deskripsi Data.....	38
5.2 Analisis Data.....	45
5.3 PEMBAHASAN	49
5.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	49
5.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	52
5.3.3 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	55
BAB VI PENUTUP	61
6.1 Kesimpulan	61
6.2 Implikasi	62
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	62
6.4 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN 1.....	68
LAMPIRAN 2.....	75
LAMPIRAN 3.....	76
LAMPIRAN 4.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah (Erawati dan Kurniawan, 2018).

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mewajibkan seluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan menggunakan basis akrual. Menurut Carlin (2005) pengadopsian akuntansi akrual merupakan keperluan organisasi publik untuk tujuan (a) kemudahan dalam administrasi; (b) implementasi manajemen yang baik, motivasi untuk perubahan; dan (c) meningkatkan pengelolaan keuangan dan kinerja sektor publik. Informasi berbasis akrual mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan efisiensi dan menilai kinerja (Mellor, 1996; Ryan, 1998; Pallot, 2001; Barrett, 2004).

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi berkualitas tinggi mengenai posisi dan kinerja keuangan dari suatu entitas yang

bagi para stakeholder dalam proses pengambilan keputusan (IAS 1, 2015).
proses pencapaian tersebut, maka pemerintah daerah mencanangkan



penerapan laporan keuangan basis akrual. Proses pengambilan keputusan publik yang semakin terdesentralisasi memaksa manajer publik menyusun laporan keuangan yang relevan dan reliable untuk memperoleh informasi yang akurat bagi pengambil keputusan. Akuntansi akrual dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan serta mampu menyajikan informasi yang lebih baik dalam rangka pengambilan keputusan (Kober dkk., 2010). Manfaat SAP bagi pemerintah yakni dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan transparan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah (Simanjuntak, 2010).

Manfaat SAP berbasis akrual antara lain adalah memberikan informasi pembading (*comparability*) antar laporan keuangan pemerintah (Halim dan Kusufi, 2014). Penelitian *International Federation of Accounting (IFAC) Public Sector Commitee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, posisi keuangan pemerintah daerah dan perubahannya serta bagaimana pemerintah daerah mendanai kegiatannya dapat diidentifikasi dan diukur secara tepat.

Akuntansi berbasis akrual dianggap dapat memberikan informasi yang lebih berguna untuk pengambilan keputusan dibandingkan akuntansi berbasis kas (Hasibuan dan Muda, 2013). Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif, yaitu transaksi tercatat pada periode tercatat

at dipertanggung jawabkan. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas



apabila memenuhi prasyarat yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Hasil penelitian *International Federation of Accounting (IFAC) Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, posisi keuangan pemerintah daerah dan perubahannya serta bagaimana pemerintah daerah mendanai kegiatannya dapat diidentifikasi dan diukur secara tepat. Halim dan Kusufi (2014) yang menyatakan bahwa manfaat SAP berbasis akrual antara lain adalah meningkatkan keterbandingan (*comparability*) antar laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Apabila laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan SAP, maka laporan keuangan tersebut menjadi kurang berkualitas. Laporan keuangan yang andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Selain itu juga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan pada entitas lain. Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan dalam istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Goenawan, 2012).

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka selain

dan menerapkan aturan-aturan baik Undang-Undang maupun peraturan
ah ataupun peraturan lainnya diperlukannya kualitas sumber daya



manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dan komitmen organisasi (lihat Pamungkas, 2018). Hal tersebut perlu diperhatikan agar laporan keuangan dapat disampaikan kepada publik dengan tepat waktu dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik.

Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia dalam satu organisasi dan untuk mencapai tujuan organisasi yang meliputi latar belakang pendidikan yang diperoleh responden pemahaman tentang tugasnya, kesiapan, dalam melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Alfian, 2015). Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2015) menunjukkan hasil sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap kualitas akuntansi berbasis akrual berdasarkan SAP. Kualitas sumber daya menentukan kualitas SAP berbasis akrual.

Teknologi informasi yang lebih maju menentukan kualitas sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah (Switriansyah dkk., 2015). Sementara komitmen organisasi sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi sebagai suatu keadaan dimana seorang individu

organisasi serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan aannya dalam organisasi (Robbins dan Judge, 2008). Adanya komitmen



organisasi membuat sikap pegawai menunjukkan kepedulian dan kesetiaan yang tinggi pada organisasi.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang di hasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Penambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. Kualitas akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah tidak lepas dari faktor-faktor yang ada pada pemerintah daerah tersebut antara lain kompetensi sumber daya manusia, pengguna teknologi informatika, komitmen organisasi.

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan berbasis akrual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pentingnya penyusunan laporan keuangan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah ditentukan oleh beberapa faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi.

esifik rumusan masalah penelitian ini adalah:



1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas kualitas laporan keuangan berbasis akrual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam penerapan teori.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang menggunakan SAP berbasis akrual.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Konsep Laporan Keuangan

Kerangka konseptual yang diterbitkan oleh FASB mulai tahun 1979 dimulai dengan perumusan tujuan pelaporan keuangan (SFAC 1,1979). Dasar penyajian informasi adalah kegunaannya bagi pengambilan keputusan. Postulat akuntansi tidak dimasukkan dalam kerangka konseptual, tetapi karakteristik informasi menjadi dasar penentuan kegunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Kerangka konseptual ini sesuai dengan teori keputusan. Konsep pengukuran yang ada dalam praktik yaitu *revenue-expense* diganti dengan *asset-liability*. Laporan keuangan tetap dipandang sebagai satu kumpulan laporan yang berartikulasi. Pendekatan pengukuran aktiva mengakui berbagai pendekatan yang berlaku dalam praktik, walaupun standar akuntansi yang dikeluarkan mengarah pada nilai pasar (*mark to market*). Pengukuran laba didasarkan pada *capital maintenance concept*, yaitu konsep laba ekonomi. Pengakuan laba yang disebut *comprehensive income* mencakup laba yang sudah dan belum direalisasi. Pendekatan ini lebih mengarah pada prinsip *earned*, dan meninggalkan prinsip realisasi. Konsep ini juga mendekati konsep nilai tambah (*value added*) (Baridwan, 2000).

Dalam SFAC No.1 (1979) dinyatakan bahwa salah satu tujuan pelaporan adalah menyediakan informasi arus kas. Atas dasar SFAC ini kemudian standar akuntansi keuangan yang mengharuskan perusahaan



menyajikan laporan arus kas disamping neraca, laporan laba-rugi, dan laporan perubahan modal. Penyajian informasi arus kas ini sesuai dengan kebutuhan keputusan di bidang keuangan yang didasarkan pada penggunaan nilai tunai arus kas. Dengan demikian, pelaporan akuntansi tidak hanya menyajikan informasi akuntansi akrual saja, tetapi juga informasi kas. Perkembangan konsep yang dilakukan oleh FASB ini tidak berjalan tanpa tantangan. Berbagai tulisan diterbitkan untuk mengevaluasi SFAC dan SFAS yang dalam beberapa hal berbeda dengan konsep-konsep dan standar yang digunakan APB, misalnya diubahnya dasar *revenue-expense* menjadi *asset-liability*, tujuan penyajian informasi keuangan, konsep laba dan sebagainya. Beaver dan landsman (1983) menilai manfaat informasi akibat diterbitkannya standar akuntansi dalam masa inflasi. Bernard dan Stober (1989) membandingkan informasi arus kas dengan informasi akuntansi akrual. Dechow (1994) membandingkan manfaat informasi arus kas dengan informasi akuntansi untuk mengukur kinerja. Dawson et al (1980) meneliti tentang dampak perbedaan metode akuntansi.

2.1.2 Konsep New Public Management

New public management (NPM) mulai berkembang pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Hal ini mulai di praktikan di Inggris dan pemerintah lokal negara bagian di Amerika Serikat. Pollitt (1995) mendefinisikan NPM sebagai sebuah pandangan, sebuah ideologi atau kumpulan teknik dan pendekatan manajemen yang diambil dari sektor privat bertujuan laba. Sementara Hood (1995) mendefinisikan

sebagai sebuah gagasan sistem yang dilakukan oleh sektor privat dan di
 oleh sektor publik.



New public management berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor privat lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang di terapkan sektor swasta ke sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan publik (Mardiasmo, 2009).

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut di perlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen dkk., 2007).

Reformasi akuntansi pemerintahan sering menjadi langkah pertama reformasi pemerintah dan itulah sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi keberhasilan reformasi pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi NPM, seperti reformasi organisasi dan manajerial. Oleh karena itu, penerapan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan keberhasilan praktik dan teknik NPM lain dalam organisasi publik. Tanpa implementasi yang memadai dan sukses, semua

an, tujuan dan harapan reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem yang baru tidak akan dapat memberikan informasi manajerial dan



keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukungnya (Christiaens dan Van Peteghem, 2007).

Menurut Pollitt (1995) adopsi inovasi NPM dapat dikategorikan pada empat tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, (2) keputusan, (3) praktik, (4) dampak dari perubahan. Inovasi NPM secara teknis digunakan oleh organisasi sektor publik, termasuk faktor-faktor kontekstual dan organisasi yang dapat mempengaruhi penggunaan teknik-teknik baru dalam praktik. Dalam konteks NPM dan mengikuti contoh dari sejumlah negara lain di Eropa dan seluruh dunia, pemerintah Indonesia juga mengalami sejumlah perubahan akuntansi keuangan dan reformasi selama hampir satu dekade terakhir dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi yang meningkat.

2.1.3 Teori Akuntansi Positif

Pengelolaan keuangan yang baik menggambarkan kinerja manajer sektor publik yang baik. Upaya untuk menjadikan pengelolaan keuangan yang lebih baik, tentunya dibutuhkan suatu penerapan sistem pelaporan keuangan yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan akuntansi basis akrual. Penerapannya tentunya diharapkan akan memperoleh dapat memberi manfaat terhadap pemerintah. Teori akuntansi positif menjelaskan penerapan akuntansi akrual sebagai pemenuhan kebutuhan politisi dan birokrat untuk pengendalian eksternal terhadap manajer di sektor publik (Pina et al, 2009). Teori akuntansi positif ini berkembang karena adanya ketidakpuasan terhadap teori akuntansi

(Watt dan Zimmerman, 1986). Selain itu akuntansi normatif juga dianggap berharga untuk menganalisa teori akuntansi. Oleh karena itu teori akuntansi



positif dikembangkan agar dapat menjelaskan atau menganalisa teori akuntansi dengan baik.

Watt dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa teori akuntansi positif dikembangkan untuk orientasi pada penelitian empirik. Menurut Godfrey et al (2010) dari sudut pandang ekonomi, teori akuntansi positif berusaha menjawab apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam pemilihan metode akuntansi alternatif, apakah biaya yang diperoleh sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam regulasi dan proses penentuan standar akuntansi, dan apa dampak laporan keuangan yang dipublikasikan pada harga saham. Teori akuntansi positif berkaitan dengan prediksi tindakan sebagaimana pilihan atas kebijakan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana manajer akan merespons terhadap akuntansi baru tersebut (Scott, 2003).

2.1.4 Teori Stukturisasi

Teori strukturasi menggabungkan struktur yang menjadi komponen utama dalam teori institusional dengan agen yang menjadi pokok dari konsep pengaruh manusia (*human influence*) (Giddens, 1984) Kerangka kerja teori strukturasi mendalilkan bahwa hubungan yang dinamis antara struktur dan agen untuk melakukan perubahan di struktur dan sistem sosial merupakan hasil dari perilaku manusia yang dimungkinkan dan dibatasi oleh struktur. Struktur digambarkan oleh tekanan institusional sedangkan agen digambarkan oleh komitmen organisasi.

mitmen didefinisikan sebagai sebuah kepercayaan karyawan terhadap nilai
ingnya perubahan bagi organisasi (Herscovitch dan Meyer, 2002).
en yang memiliki komitmen untuk berubah akan mendukung perubahan



karena mereka memang menginginkannya (*want to*). Manajemen dengan komitmen yang kuat akan bertindak melebihi batas apa yang secara teknis diperlukan untuk memastikan perubahan itu berhasil. Noubert dan Cady (2001) menyatakan bahwa pegawai yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan perubahan lebih memungkinkan untuk menemukan member baru. Parish dkk. (2008) menemukan bahwa komitmen memengaruhi karyawan untuk meningkatkan kinerja, menyukseskan implementasi perubahan, dan proses belajar individu terkait perubahan.

2.1.5 Teori Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model (TAM) diperkenalkan pertama kali oleh Davis pada tahun 1989. TAM merupakan adaptasi TRA menjadi model pendekatan dasar yang banyak digunakan untuk penelitian *user acceptance* suatu teknologi informasi. Davis menyatakan ada berbagai variabel yang dapat mempengaruhi penggunaan sistem oleh individu, namun persepsi kemanfaatan (*of usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) adalah dua faktor yang paling penting. Niat individu menggunakan sistem dipengaruhi oleh keyakinan bahwa sistem akan membantu meningkatkan kinerja. Persepsi atas kemanfaatan teknologi adalah ketika pengguna percaya menggunakan sistem tertentu akan membantu mereka melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik (Davis, 1989).

Menurut TAM, penggunaan aktual seseorang dari sistem teknologi

...hi langsung atau tidak langsung oleh niat perilaku pengguna, sikap

...penggunaan persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan dari system.

...ga mengusulkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi niat dan



penggunaan aktul melalui efek diperantari pada persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan (Davis, 1989).

2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dibentuk berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004, sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 pasal 57 tentang perbendaharaan negara. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa diperlukan suatu Komite Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang bertugas menyusun SAP. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 tentang keuangan negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 mengenai KSAP telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005, dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang KSAP. KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan KSAP dalam tugasnya telah menyusun SAP berbasis *cash*

accrual, dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005. Terakhir dikeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur SAP berbasis akrual penuh (*full accrual*).



Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan tahap awal dari proses dimulainya akuntansi pemerintah berbasis akrual. Peraturan pemerintah ini mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional, di antaranya dengan mengadaptasi *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountant (IFAC)*. Dalam pelaksanaannya, KSAP masih menggunakan strategi adaptasi, di mana secara prinsip pengembangan SAP berorientasi pada IPSAS, namun disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, antara lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, praktik-praktik keuangan yang ada, serta kesiapan sumber daya para pengguna SAP. Adaptasi yang di maksud adalah menggunakan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam SAP adalah LRA, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dilihat dari jenis laporan keuangan yang dihasilkan, terdapat perbedaan antara SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. Dalam SAP berbasis akrual, entitas pelaporan diwajibkan untuk menerbitkan laporan tambahan yaitu laporan operasional. Laporan perubahan SAL dan laporan perubahan ekuitas. Para pengelola perlu memiliki pemahaman memadai tentang standar akuntansi keuangan daerah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang handal. Dalam fungsi pengukuran, akuntansi melakukan proses pengumpulan, pencatatan realisasi

an dan belanja serta transaksi-transaksi yang terjadi diluar pendapat dan



belanja, serta aktifitas pelaporan. Selanjutnya akan dapat digunakan sebagai pengukur kinerja ekonomis, efisien, dan efektivitas pemerintah daerah.

2.1.7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah sarana utama perusahaan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang-orang yang diluar perusahaan, merepresentasikan sejarah perusahaan yang diukur dalam bentuk uang (Kieso, 2011). Sementara itu menurut Mardiasmo (2009) akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja operasional. Laporan Keuangan biasanya berisi (1) neraca, (2) laporan laba rugi, (3) laporan arus kas dan (4) laporan perubahan ekuitas (5) laporan Operasional, (6) laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keempat hal tersebut (Kieso, 2011). Pernyataan standar akuntansi pemerintahan (SPAP) Nomor 1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai lokasi

nya. Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan memadai agar dapat di jadikan dasar pengambilan keputusan yang cermat dan marjo, 2010).



Guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk menyajikan dan mengungkapkan elemen akuntansi LKPD sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAP. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum (Bastian, 2010), sehingga kesesuaian dengan standar akuntansi merepresentasikan kepatuhan terhadap SAP. Salah satu kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kondisi pemerintah yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan SAP berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, namun belum sepenuhnya sesuai dengan PP tersebut.

2.1.8 Karakteristik kualitas laporan keuangan berbasis akrual

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran 1 tentang kerangka konseptual, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan.

1. Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan

atau mengoreksi laporan keuangan yang relevan dapat di hubungkan maksud penggunaannya. Ciri-ciri informasi yang relevan adalah sebagai



berikut: (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*); (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). (c) Tepat waktu; dan (d) Lengkap.

2. Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat di andalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (a) Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; (b) Dapat diverifikasikan (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; (c) Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dalam periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandinagn secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang di perbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang



sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, Pengguna di asumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan dengan menyederhanakan akses antara unit kerja. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer bertujuan untuk memperlancar arus informasi dan untuk memberikan kemudahan bagi para pengelola keuangan untuk menghasilkan informasi yang dapat

, relevan, tepat waktu, lengkap dan dapat dipahami.



2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas SAP Berbasis Akrua

Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk fungsi akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya manusia tersebut (Azman, 2015). Kompetensi SDM dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. SDM tersebut mampu memahami logika akuntansi sehingga mendukung penerapan sistem akuntansi (Erawati dan Kurniawan, 2018). Sumber daya manusia memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrua (Permana dan Wiratmaja, 2016).

2.2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas SAP Berbasis Akrua

Teknologi informasi didefinisikan sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menganalisis, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan



informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Rahman, 2015). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer, perangkat lunak, database, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Nadir dan Hasyim, 2017).

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pada pemerintah daerah yang berbasis akrual mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisis dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi standar akuntansi pemerintah pada sektor publik yang berbasis akrual (Erawati dan Kurniawan, 2018).

2.2.3 Komitmen Organisasi terhadap Kualitas SAP Berbasis Akrual

Komitmen organisasi ialah suatu keadaan seseorang karyawan yang memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan. Robbins (2008) berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi karyawan suatu keadaan individu yang mempunyai sifat organisasi dan tujuan dan ingin untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Zeyn (2011) mendefinisikan bahwa komitmen organisasi merupakan sebagai suatu daya

orang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian



organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi

Komitmen organisasi merupakan keadaan dimana pegawai mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sarasanya serta berharap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Sulaiman dan Abdullah, 2016). Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Kejelasan anggaran mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah daerah berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Athukorala dan Reid (2003) menguraikan beberapa kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan basis akrual, yaitu komitmen politik, strategi komunikasi atas perubahan, ketersediaan tenaga akuntan yang handal, ketersediaan sistem informasi akuntansi, sumberdaya yang memadai dari lembaga audit negara dan pemahaman yang luas atas perubahan penerapan basis akuntansi yang tidak sekedar perubahan metode, melainkan termasuk perubahan budaya.

Hepworth (2002) menjelaskan beberapa prasyarat yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan pengenalan akuntansi akrual ke sektor publik dan untuk

alkan kemungkinan hambatan utama yang mungkin terjadi dengan
dasinya antara lain dilakukannya konsultasi yang mendalam antara pihak
partisipasi profesi akuntansi untuk dukungan pelatihan dan teknikal,



pengembangan standar akuntansi pemerintah yang sejalan dengan sektor privat serta dukungan lembaga audit. Sementara itu, IFAC (2003) menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik dan kecepatan proses transisi basis akuntansi, diantaranya tingkat komitmen politik serta kapasitas sumber daya manusia dan organisasi.

Penelitian Pamungkas (2018) mengamati pengaruh faktor-faktor kesiapan pemerintah daerah di Indonesia atas implementasi SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual Pemerintah Daerah (LKPD) pada awal penerapan basis akrual pada tahun anggaran 2015. Penelitian ini mengembangkan data dari hasil pemeriksaan kinerja BPK atas upaya pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual dengan menggunakan tiga variabel yaitu komitmen atas regulasi dan kebijakan, pengelolaan sumber daya manusia pada pengelola keuangan dan aset dan teknologi informasi dan pengelolaan IT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia pengelola keuangan, aset dan TI memiliki pengaruh positif terhadap kualitas LKPD berbasis akrual. Sebaliknya, komitmen atas regulasi dan kebijakan serta pengelolaan TI tidak memiliki pengaruh yang cukup terhadap peningkatan kualitas LKPD.

Penelitian yang dilakukan oleh Risnaningsih (2016) menerangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penerapan SAP berbasis akrual diantaranya penyusunan standar yang tidak independen, produk hukum yang saling bertentangan, minimnya dukungan politik elit pemerintah, kurangnya respon

van Perwakilan Rakyat dan masyarakat, serta kurangnya staf yang as. Sementara, Suparman dkk (2015) mengungkapkan bahwa beberapa



inisiatif untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual antara lain penerapan peraturan perundang-undangan, penggunaan berbagai metode komunikasi dan sosialisasi untuk mengenalkan sistem akrual, dan memperoleh masukan dari berbagai pihak antara lain akuntan profesional dan akademisi. Namun, kurangnya pelatihan dan akuntan professional dalam lingkungan akuntansi pemerintahan, masih digunakannya anggaran berbasis kas, dan sistem informasi yang tidak terintegrasi merupakan kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual di Indonesia.

Penelitian Erawati dan Kurniawan (2018) menguji penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dari aspek berperilaku yaitu komitmen organisasi, sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif dan pengambilan data dengan teknik survei. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Megelang dengan responden adalah kepala bagian keuangan, sub bagian keuangan serta staf - staf pada bagian keuangan. Teknik pengambilan sampel adalah dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi akrual dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Sementara itu, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

